

Analisis Persepsi Pelaku UMKM terhadap BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Jaminan Sosial (Studi Kasus Pelaku UMKM Pasar Simpang Limun Medan)

Ryan Hidayat*, Andri Soemitra, Isnaini Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
*ryanhidayat.gemidu@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to understand and analyze the perception of Micro, Small, and Medium Enterprises in the Simpang Limun Medan Market towards BPJS Employment as a form of social security. This type of research is qualitative descriptive research, where the data must be in the form of descriptive information with theories developed based on the data obtained. This research was carried out at the Simpang Limun Market in Medan. There are 350 MSME actors, the author selected 13 informants of MSME actors to be interviewed. Of these 13 informants, only 4 people are members of BPJS Ketenagakerjaan. Data collection was carried out by observation, documentation, and in-depth interviews. The data analysis method used in this study is the Miles and Huberman model, which is based on data reduction, namely summarizing, focusing on important aspects, selecting relevant data, and simplifying so that it affects conclusions and verification. The data validity technique is used triangulation by comparing various sources of information. The results of the study show that Micro, Small, and Medium Enterprises in the Simpang Limun Market still have low awareness of BPJS Ketenagakerjaan. Observations in the field show that most MSME actors in Pasar Simpang Limun do not have adequate social security protection, which makes them vulnerable to social and economic risks. Lack of information, cost constraints, and complicated registration procedures are the main factors that hinder their participation in this social security program. In addition, limited access to BPJS offices and negative experiences in filing claims also worsened their perception of the benefits of this program. There needs to be a more effective effort to increase awareness and involvement of MSME actors in BPJS Ketenagakerjaan.

Keywords: Perception; BPJS Employment; MSME Actors

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis persepsi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Pasar Simpang Limun Medan terhadap BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk jaminan sosial. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana data harus berupa informasi secara deskriptif dengan teori-teori yang dikembangkan berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Simpang Limun Medan. Ada 350 pelaku UMKM, penulis memilih 13 informan pelaku UMKM untuk di wawancarai. Dari 13 informan ini yang menjadi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan hanya 4 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman, yang didasarkan pada reduksi data yaitu merangkum, memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang penting, memilih data yang relevan, dan menyederhanakan sehingga berpengaruh pada kesimpulan dan verifikasi. Teknik keabsahan data digunakan triangulasi dengan membandingkan berbagai sumber informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah di Pasar Simpang Limun masih memiliki kesadaran yang masih rendah terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Pasar Simpang Limun belum memiliki perlindungan jaminan sosial yang memadai, yang membuat mereka rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi. Kurangnya informasi, kendala biaya, serta prosedur pendaftaran yang rumit menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi mereka dalam program jaminan sosial ini. Selain itu, akses yang terbatas terhadap kantor BPJS dan pengalaman negatif dalam pengajuan klaim juga memperburuk persepsi mereka terhadap manfaat program ini. Perlu adanya upaya yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan pelaku UMKM dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Persepsi; BPJS Ketenagakerjaan; Pelaku UMKM

Pendahuluan

Dalam konteks sistem ketenagakerjaan Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan muncul sebagai transformasi institusional dari PT Jamsostek (persero) yang beroperasi sebagai payung perlindungan komprehensif bagi tenaga kerja, baik yang bergerak dalam sektor formal maupun informal (Akbar et al., 2023). Manifestasi program ini merepresentasikan komitmen negara dalam menggaransi setiap elemen angkatan kerja dari ancaman sosial ekonomi melalui skema asuransi sosial yang terstruktur (Rahma, 2021).

Cakupan proteksi yang disediakan menunjukkan karakteristik holistik, meliputi jaminan terhadap risiko insiden okupasional, kompensasi fatalitas yang berkaitan dengan aktivitas produktif, akumulasi dana masa depan, serta program pensiun untuk pekerja beserta keluarganya (Irdanasari, 2021). Eksistensi mekanisme jaminan ini menjadi kritikal mengingat prevalensi pekerja informal yang masih beroperasi tanpa proteksi sosial yang kuat. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan substantif, terutama bagi pekerja senior dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa mendatang (Aprillia, 2023).

Fondasi yuridis perlindungan sosial ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang mengamanatkan penyediaan layanan sesuai kebutuhan dan kompensasi finansial sebagai substitusi parsial terhadap *income* yang mengalami reduksi atau eliminasi. Konseptualisasi jaminan sosial, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, merupakan benteng proteksi sosial yang mengasuransikan setiap individu dapat memenuhi kebutuhan fundamental hidupnya dengan layak.

Regulasi yang mengatur jaminan sosial di Indonesia diperkuat oleh Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang memiliki sinergi dengan Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai infrastruktur hukum penyelenggaraan program. Perspektif internasional melalui *International Labour Organization* (ILO) juga memberikan definisi yang ekspansif, bahwa jaminan sosial pada esensinya adalah sistem protektif yang difasilitasi pemerintah untuk melindungi warganya dari ancaman ekonomi atau sosial yang berpotensi menghentikan atau secara drastis mereduksi pendapatan mereka (Kusuma et al., 2021).

Sebagai instrumen kebijakan makro ekonomi, proteksi sosial tidak hanya berfungsi sebagai perisai ekonomi bagi masyarakat dan keluarganya, tetapi juga merupakan manifestasi hak asasi manusia yang fundamental bagi kemanusiaan. Responsibilitas negara dalam memproteksi warganya melalui sistem jaminan sosial nasional menjadi sangat vital, khususnya ketika *income* masyarakat mengalami penurunan akibat sakit, kehilangan pekerjaan, atau memasuki fase usia lanjut (Lubis, 2023).

Tantangan utama yang dikonfrontasi peserta jaminan sosial di Indonesia adalah kesulitan dalam memenuhi obligasi iuran periodik. Meskipun program ini telah memberikan kontribusi positif terhadap eskalasi kesejahteraan masyarakat, masih banyak individu yang mengalami rintangan dalam mengaksesnya, khususnya mereka yang bergerak di sektor informal seperti pedagang, driver online, nelayan, dan profesi sejenis. Defisiensi kesadaran masyarakat tentang signifikansi jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi pekerja informal. Kondisi ini diperparah oleh karakteristik pekerja informal yang seringkali mengabaikan aspek keselamatan kerja, sehingga mereka lebih rentan terhadap risiko penyakit dan kecelakaan (Nurdiana, 2024).

Pasar Simpang Limun, sebagai salah satu pusat perdagangan di Kota Medan, Sumatera Utara, menjadi representasi dinamika ekonomi masyarakat urban. Mayoritas aktivitas ekonomi di kawasan ini melibatkan diversifikasi jenis usaha, mulai dari pedagang sayur-sayuran, buah-buahan, sektor kuliner, hingga berbagai komoditas lainnya. Pedagang kaki lima, sebagai salah satu manifestasi bisnis informal yang memerlukan kapital relatif kecil, tidak hanya membutuhkan *income* harian, tetapi juga sangat memerlukan proteksi terhadap risiko insiden okupasional, mortalitas, dan bentuk jaminan sosial lainnya.

Menurut klasifikasi BPJS Ketenagakerjaan, pekerja BPU (Bukan Penerima Upah) adalah individu yang memiliki usaha atau aktivitas produktif mandiri yang menghasilkan pendapatan dari hasil usahanya sendiri. Regulasi Perundang-Undangan Nomor 44 tahun 2015 mengatur bahwa pekerja sektor informal berhak mendapatkan jaminan pembiayaan perawatan medis akibat insiden okupasional. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995, PT Jamsostek ditetapkan sebagai operator Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan misi memberikan proteksi fundamental untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya, dengan mekanisme preventif hilangnya sebagian atau keseluruhan penghasilan akibat risiko-risiko sosial (Khofifah et al., 2023).

Masalah yang dikonfrontasi pedagang buah-buahan memiliki korelasi erat dengan isu jaminan sosial, mengingat proporsi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan masih relatif rendah. Upaya eskalasi proteksi dan kesejahteraan menjadi urgensi untuk mendorong produktivitas nasional. Data BPJS Ketenagakerjaan hingga November 2024 mencatat bahwa jumlah peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Medan mencapai 63,58 juta orang, dengan komposisi sekitar 68,55% peserta aktif dan 31,45% peserta non-aktif.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 menegaskan bahwa korban insiden okupasional berhak mendapatkan kompensasi finansial atau perawatan kesehatan sebagai konsekuensi dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat lingkungan kerja. Mengingat peran strategis tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi nasional, eskalasi proteksi pekerja menjadi prioritas yang harus diimplementasikan pemerintah terhadap pelaku usaha (Lestari & Yusrizal, 2023).

UMKM berperan sebagai jalur utama ekonomi Indonesia dengan karakteristik unik yang memerlukan pendekatan khusus dalam pengembangannya. Dalam proses pengembangan ini, teknologi finansial harus mempertimbangkan kekhasan dan kebutuhan UMKM untuk menghasilkan manfaat optimal (Fahdia et al., 2022). Eksistensi UMKM memberikan peluang promosi produk kreatif lokal dan membuka peluang bisnis bagi pemilik usaha lokal (Andaiyani et al., 2020).

Kapasitas strategis UMKM dalam mendorong perekonomian nasional tidak dapat diabaikan. Selain berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penyediaan employment, UMKM juga berperan dalam pelaporan pencapaian pembangunan. Dalam menghadapi krisis global, sektor ekonomi mikro, kecil, dan menengah menunjukkan ketangguhan

yang luar biasa. UMKM mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui tingkat penerimaan tenaga kerja yang tinggi. Peran strategis sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menopang struktur perekonomian nasional tercermin melalui kemampuannya menciptakan lapangan kerja baru, memperluas kapasitas serapan tenaga kerja, mendorong akselerasi pertumbuhan PDB, meningkatkan kinerja ekspor, mendorong pembentukan modal tetap, serta berfungsi sebagai instrumen penyangga sosial-ekonomi bagi kelompok berpenghasilan rendah agar dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi yang produktif (Abdurohim, 2023).

Menurut konsepsi Halim (2020), usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kategori usaha yang memproduksi barang dan jasa dengan memanfaatkan bahan baku utama dan mengandalkan metodologi tradisional, *skill*, serta sumber daya alam (SDA) setempat. Karakteristik UMKM meliputi produk yang mudah diaplikasikan, teknologi sederhana, kompetensi dasar yang umumnya telah dikuasai, memiliki banyak tanggung jawab terkait pekerjaan, fleksibilitas temporal yang tinggi, orientasi pasar yang sebagian besar lokal atau domestik, serta potensi pengembangan yang menjanjikan.

Ciri-ciri UMKM, sebagaimana diuraikan Abdurohim (2023), mencerminkan diversitas jenis usaha yang ada. Karakteristik tersebut antara lain: aksesibilitas sumber daya alam yang mudah, implementasi teknologi sederhana yang mudah digunakan, penguasaan keterampilan dasar yang umumnya telah dimiliki dan didukung oleh banyak tenaga kerja, serta tersedianya waktu luang yang dapat dioptimalkan untuk berbagai keperluan. Beberapa komoditas bahkan memiliki keunikan yang terkait dengan kekayaan seni budaya daerah setempat dan memberikan dukungan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah mendefinisikan segmen usaha mikro merepresentasikan unit ekonomi produktif yang dioperasikan oleh individu atau entitas korporasi perorangan, dengan karakteristik kapitalisasi terbatas. Batasan kuantitatif yang menjadi parameter pembeda mencakup kepemilikan aset dengan valuasi maksimal 50 juta rupiah serta pencapaian volume penjualan tahunan yang tidak melampaui 300 juta rupiah. Entitas dalam kategori ini umumnya mengandalkan modal kerja minimal dan struktur organisasi yang relatif sederhana, namun memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan di tingkat komunitas.

Selanjutnya adalah kategori usaha kecil yang mencakup aktivitas ekonomi produktif yang dikelola oleh individu atau badan hukum dengan karakteristik independensi operasional. Kriteria fundamental yang membedakan kategori ini adalah ketiadaan hubungan afiliasi, baik dalam bentuk kepemilikan langsung maupun tidak langsung, dengan entitas usaha yang berada pada tingkatan menengah atau besar. Aspek otonomi ini menjadi prasyarat esensial, mengingat independensi operasional memungkinkan fleksibilitas strategis dan responsivitas terhadap dinamika pasar lokal yang tidak dapat dicapai oleh unit usaha yang terikat dalam struktur korporasi yang lebih kompleks.

Strata usaha menengah merepresentasikan entitas ekonomi produktif yang telah mencapai tingkat sofistikasi operasional tertentu, namun tetap mempertahankan karakter independensi struktural. Pembeda utama terletak pada absennya ketergantungan hierarkis atau kepemilikan silang dengan unit usaha dalam kategori kecil maupun besar. Parameter kuantitatif yang menjadi acuan klasifikasi meliputi jaringan perusahaan serta volume penjualan tahunan yang berada dalam rentang spesifik. Karakteristik ini mencerminkan posisi transisional dalam spektrum perkembangan usaha, di mana entitas telah melampaui keterbatasan skala mikro dan kecil, namun belum mencapai kompleksitas operasional usaha besar.

Optimalisasi peran pelaku UMKM dalam pertumbuhan ekonomi memerlukan development strategis yang bertujuan memastikan *sustainability* bisnis dalam mengatasi tantangan yang muncul dan bergerak menuju arah yang lebih progresif, maju, dan mandiri. Pertumbuhan UMKM menjadi sangat kritical karena kemampuannya menciptakan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha besar. UMKM juga menunjukkan tingkat diversifikasi yang tinggi dan memberikan kontribusi besar pada perdagangan serta ekspor, sehingga menjadi salah satu kontributor devisa negara. Namun, kontribusi perusahaan besar masih jauh lebih dominan dibandingkan perusahaan mikro, kecil, dan menengah (Sembiring et al., 2023).

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memegang peranan vital dalam eskalasi pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bisnis UMKM memiliki signifikansi tinggi bagi suatu daerah, terutama sebagai salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Melalui aktivitas UMKM, produk kreatif daerah dapat dikenal lebih luas dan memberikan peluang usaha bagi penduduk setempat. Selain itu, UMKM berperan aktif dalam pembangunan perekonomian nasional, khususnya dalam implementasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, mengingat UMKM sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan per kapita dan perekonomian regional (Halim, 2020).

Penelitian yang dilakukan Damayanti (2024) mengungkapkan bahwa pekerja sektor informal, seperti pedagang di pasar, menghadapi tantangan finansial dan administratif dalam proses registrasi BPJS Ketenagakerjaan. Faktor-faktor ini menjadi rintangan signifikan bagi partisipasi mereka. Persepsi peserta terhadap layanan BPJS ketenagakerjaan sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem layanan dan durasi proses klaim. Persepsi negatif sering muncul akibat keterlambatan dan minimnya transparansi informasi (Oktapianti, 2024).

Pemahaman terhadap persepsi pelaku UMKM mengenai BPJS Ketenagakerjaan menjadi aspek yang kritical untuk dieksplorasi. Menurut Sunaryo et al., (2021), persepsi merupakan proses kognitif di mana seorang individu melakukan seleksi, *planning*, dan interpretasi informasi untuk mengeksekusi tugas tertentu. Elemen bahasa, kesadaran, memori, dan pemikiran semuanya memberikan pengaruh terhadap pembentukan persepsi. Namun, penting untuk dipahami bahwa persepsi tidak selalu refleksi akurat dari realitas objektif. Berbagai industri dan pasar memiliki perspektif yang beragam tentang digitalisasi, di mana persepsi dapat dipengaruhi oleh objektif yang ingin dicapai dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Rahayu (2020) menjelaskan bahwa persepsi seseorang dibentuk oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup attitude, emosi, dan karakteristik personality seseorang. Persepsi dapat dipengaruhi oleh sikap, perasaan, ekspektasi, fokus attention, serta interest dan motivasi seseorang, yang menunjukkan bagaimana individu memproses dan menginterpretasi informasi yang diterima. Faktor eksternal berkaitan dengan pengaruh lingkungan dan kondisi eksternal, termasuk *background* individu, informasi yang diperoleh, intensitas stimulus, repetisi aktivitas, dan pengalaman dengan hal-hal baru maupun familiar. Faktor-faktor ini membantu seseorang dalam memahami dan menganalisis informasi yang telah diperoleh.

Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya menyadari benefit yang ditawarkan program ini. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi meliputi limitasi akses informasi, stigma terkait biaya, dan persepsi negatif mengenai benefit program. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi persepsi pelaku UMKM terhadap BPJS Ketenagakerjaan serta mengidentifikasi rintangan yang mereka hadapi dalam mengakses proteksi sosial ini.

Pasar Simpang Limun Medan merupakan lokasi strategis dengan konsentrasi pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha. Pasar ini mencerminkan dinamika usaha kecil

di perkotaan yang sering beroperasi dalam kondisi penuh tantangan. Pemahaman terhadap cara pandang pelaku UMKM di lokasi ini mengenai BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk proteksi sosial menjadi sangat penting. Penelitian ini akan memfokuskan pada akumulasi data dari pelaku UMKM di Pasar Simpang Limun untuk menggali perspektif mereka mengenai program jaminan sosial tersebut.

Berdasarkan konteks di atas, peneliti bermaksud melakukan kajian survei dan wawancara mendalam di Pasar Simpang Limun Medan. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku UMKM terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, peneliti akan mengeksplorasi tingkat literasi UMKM mengenai benefit program tersebut. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai cara pelaku UMKM menilai proteksi jaminan sosial dan rintangan yang mereka hadapi.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini disebut penelitian deskriptif kualitatif, yang berarti data disajikan dengan menggunakan kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian deskriptif kualitatif ini mengumpulkan data berupa kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Simpang Limun Medan. Subjek penelitian ini berjumlah 350 pelaku UMKM, penulis memilih 13 informan pelaku UMKM untuk di wawancarai. Namun dari 13 informan ini yang menjadi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan hanya 4 orang. Fokus penelitian adalah untuk memahami pandangan, pengetahuan, dan pengalaman pelaku UMKM terkait BPJS Ketenagakerjaan. Sumber data penelitian ini adalah data primer, dimana penulis mengamati dan berdiskusi dengan para pelaku UMKM secara mendalam. Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman, yang didasarkan pada reduksi data yang meliputi merangkum, memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang penting, memilih data yang relevan, dan menyederhanakan sehingga berpengaruh pada kesimpulan dan verifikasi. Hasilnya, data akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mengidentifikasikannya sesuai dengan kebutuhan.

Hasil dan Pembahasan

1. Perspektif Pelaku UMKM Mengenai BPJS Ketenagakerjaan

Hasil eksplorasi melalui interview yang dilakukan peneliti kepada 13 pelaku UMKM di Pasar Simpang Limun menghasilkan respons yang sangat heterogen, dengan mayoritas pelaku UMKM masih memiliki pemahaman terbatas tentang benefit program tersebut. Melalui hasil wawancara mendalam, sebagian besar responden mengakui pentingnya program ini sebagai bentuk perlindungan sosial jangka panjang, namun ada pula yang merasa program ini kurang relevan dengan kondisi operasional usaha mereka.

Faktor dominan yang mempengaruhi persepsi ini adalah anggapan bahwa obligasi iuran menjadi beban finansial tambahan, terutama bagi usaha kecil yang masih dalam fase berkembang. Bagi mereka, prioritas utama adalah mempertahankan usaha dan memenuhi kebutuhan operasional harian dibandingkan berinvestasi dalam proteksi jaminan sosial yang benefitnya belum dirasakan secara langsung. Hal ini sebagaimana diungkapkan salah satu narasumber:

Menurut Informan 1 menyatakan, "Belum pernah mendengar tentang BPJS Ketenagakerjaan. Saya juga tidak mengetahui program apa saja yang tersedia dan bagaimana manfaatnya bagi saya. Selama ini tidak ada yang memberikan informasi atau

penjelasan langsung, jadi saya benar-benar tidak memahami. Yang membuat saya ragu juga, saya khawatir kalau ikut program ini harus membayar mahal setiap bulan. Saya tidak tahu apakah biaya yang harus dibayar sebanding dengan manfaat yang diperoleh atau tidak. Kalau biayanya terlalu tinggi dan saya malah kesulitan untuk membayarnya" (Hasil wawancara, Februari 2025)

Temuan ini menunjukkan adanya *gap* informasi yang signifikan antara program pemerintah dengan persepsi pelaku UMKM. Keterbatasan pengetahuan dan persepsi ini dapat menghambat partisipasi mereka dalam program perlindungan sosial. Selain itu, minimnya pemahaman mengenai pentingnya jaminan sosial dalam melindungi usaha mereka dari risiko juga menjadi faktor yang memperlemah situasi ini. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM tentang BPJS Ketenagakerjaan sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani dan Yusuf pada tahun 2021 yang menyatakan keterbatasan pengetahuan menghambat perlindungan sosial yang seharusnya diterima masyarakat dan ketepatan sasaran dari program perlindungan sosial ini adalah kunci keberhasilan perlindungan sosial secara teoretis.

Observasi lapangan mendukung temuan interview, di mana terlihat banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui secara detail tentang BPJS Ketenagakerjaan. Dalam interaksi sehari-hari, banyak dari mereka tampak ragu saat ditanya tentang program ini dan sebagian besar tidak memiliki material informasi atau brosur terkait. Beberapa pelaku UMKM bahkan mengaku baru mendengar terminologi BPJS Ketenagakerjaan tanpa mengetahui lebih jauh tentang manfaatnya.

2. Kendala dalam Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil interview, beberapa hambatan yang dikonfrontasi pelaku UMKM untuk bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan antara lain, ketidakpahaman pelaku UMKM mengenai definisi dan program BPJS tersebut, biaya registrasi yang tidak proporsional dengan pengeluaran rutin mereka, pendaftaran prosedur registrasi dan proses yang membingungkan dan rumit, jarak yang relatif jauh dari tempat tinggal ke kantor BPJS Ketenagakerjaan dan sebagian responden mengungkapkan kekhawatiran berdasarkan pengalaman negatif terkait kesulitan proses pengajuan klaim.

Dari 13 narasumber yang diwawancarai, hanya 4 orang yang sudah terdaftar sebagai peserta. Dengan memberikan bantuan langsung atau menyediakan sumber daya jaringan yang informatif, pihak BPJS Ketenagakerjaan dapat membantu mengatasi rintangan ini dan mendorong lebih banyak pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

3. Tingkat Kesadaran dan Pemahaman Tentang BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM, terungkap adanya disparitas yang signifikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Dari 13 responden, 8 orang memiliki pemahaman tentang program ini, sementara 5 lainnya tidak memiliki informasi yang cukup. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat *gap* dalam sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

Meskipun 8 orang dalam wawancara mengetahui tentang BPJS Ketenagakerjaan, hanya 4 orang yang telah mendaftar sebagai peserta. Hal ini sebagaimana diungkapkan salah satu narasumber:

Menurut informan 2 yang bekerja sebagai pedagang kelontong, "BPJS Ketenagakerjaan ini sangat bagus untuk diikuti, terutama untuk jangka panjang, jika nantinya saya mengalami kejadian yang tidak terduga seperti kecelakaan kerja, kematian,

dan lain-lain. Program ini memberikan perlindungan finansial yang sangat membantu, baik bagi pekerja seperti saya sebagai pelaku UMKM. Sehingga saya bisa merasa lebih tenang dan aman dalam menjalani aktivitas kerja sehari-hari" (Hasil wawancara, Februari 2025).

Hal ini mengindikasikan bahwa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang program ini tidak selalu berbanding lurus dengan tindakan partisipasi pelaku UMKM mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa kemungkinan alasan di balik rendahnya tingkat kepesertaan bisa mencakup ketidakjelasan mengenai prosedur registrasi, persepsi bahwa iuran terlalu memberatkan, atau kurangnya pemahaman tentang benefit jangka panjang yang diberikan program ini. Ada juga narasumber yang memiliki pemahaman yang baik mengenai fungsi dan benefit program ini, khususnya sebagai bentuk perlindungan jangka panjang terhadap risiko kerja. Pemahaman ini mendorong sikap positif dan rasa aman dalam menjalani aktivitas kerja.

4. Sosialisasi yang Kurang Memadai

Minimnya sosialisasi juga menjadi faktor penghambat pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam BPJS Ketenagakerjaan. Selama observasi, tidak terlihat adanya aktivitas sosialisasi atau edukasi tentang program ini di lingkungan Pasar Simpang Limun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan perlu lebih aktif dalam melakukan kampanye informasi dan edukasi kepada pelaku UMKM agar mereka memahami pentingnya proteksi jaminan sosial.

Program sosialisasi dapat diimplementasikan melalui berbagai jaringan komunikasi, seperti seminar langsung di area pasar atau pemanfaatan media sosial untuk menjangkau audience yang lebih luas. Dengan pendekatan yang lebih proaktif dalam menyebarkan informasi, diharapkan akan terjadi eskalasi kesadaran dan interest pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam program jaminan sosial.

Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran di kalangan pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih sistematis untuk meningkatkan komunikasi dan penyuluhan mengenai benefit program agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zein dan Gusvi pada tahun 2025 yang menyatakan pentingnya sinergi antar lembaga serta evaluasi berkelanjutan agar kebijakan perlindungan sosial berdampak jangka panjang.

5. Urgensi Sosialisasi dan Edukasi Berkelanjutan

Berdasarkan temuan interview, dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan upaya sosialisasi yang lebih masif dan strategis mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah, korporasi, serta lembaga terkait perlu meningkatkan pendekatan edukatif, baik melalui platform digital, seminar, maupun program langsung ke komunitas pekerja informal. Dengan meningkatnya literasi, diharapkan lebih banyak pekerja yang akan mendaftar dan memanfaatkan proteksi sosial yang tersedia. Edukasi mengenai benefit jangka panjang dari BPJS Ketenagakerjaan juga perlu diperkuat agar pelaku UMKM memahami bahwa program ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk perlindungan yang dapat memberikan keamanan finansial di masa depan. Jika sosialisasi dan pendidikan dilakukan dengan lebih sistematis, maka diharapkan tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di kalangan pelaku UMKM dapat meningkat secara signifikan.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasar Simpang Limun masih memiliki kesadaran yang masih rendah

terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Pasar Simpang Limun belum memiliki perlindungan jaminan sosial yang memadai, yang membuat mereka rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi. Kurangnya informasi, kendala biaya, serta prosedur pendaftaran yang rumit menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi mereka dalam program jaminan sosial ini. Selain itu, akses yang terbatas terhadap kantor BPJS dan pengalaman negatif dalam pengajuan klaim juga memperburuk persepsi mereka terhadap manfaat program ini. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan pelaku UMKM dalam BPJS Ketenagakerjaan. Temuan dari penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan edukasi dan dukungan yang lebih baik kepada sektor UMKM.

Daftar Pustaka

- Abdurohim. (2023). Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani (CV. Bintang Surya Madani).
- Akbar, F., Arif, M., & Syahriza, R. (2022). Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan terhadap Buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) di Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, 1(2), 156–162.
- Andaiyani, S., Yunisvita, Y., & Tarmizi, N. (2020). Peran Financial Technology sebagai Alternatif Permodalan bagi UMKM di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(2), 85–92.
- Aprillia, N., & Lubis, F. A. (2023). Analisis BPJS Ketenagakerjaan dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Khususnya Petani di Bangun Purba. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 326–333.
- Damayanti, L. M. M., Arjawa, I. G. P. B. S., & Zuryani, N. (2024). Hubungan Pengetahuan dan Persepsi terhadap Minat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada Pedagang di Pasar Badung Kota Denpasar. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(4), 104–115.
- Fahdia, M. R., Kurniawati, I., Amsury, F., & Saputra, I. (2022). Pelatihan Digital Marketing untuk Meningkatkan Penjualan bagi UMKM Tajur Halang Makmur. *Abdiformatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat Informatika*, 2(1), 34–39.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172.
- Irdanasari, R. V., & Wijayanti, I. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Ditinjau dari Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun. *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Portofolio*, 1(2), 111–122.
- Khofifah, N., Bakhri, S., & Wahyudi, I. (2023). Peran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Kesejahteraan Pekerja di Masa Mendatang pada Program BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 9(3), 327–334.
- Kusuma, R., Basniwati, A. D., Nugraha, L. G., & Hariati, S. (2021). Hak Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *Pakuan Law Review*, 7(2), 193–205.
- Lestari, A., & Yusrizal. (2023). Analisis Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terhadap Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 365–372.
- Lubis, I. F. (2023). Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja di Kantor Notaris. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(3), 362–376.

- Nurdiana, N., Soemitra, A., & Daulay, A. N. (2024). Determinant Factors of Gojek Drivers' Interest in Using Social Security Administrator Employment in Medan City. *Journal La Sociale*, 5(3), 564–576.
- Oktapianti, W. A., Putri, D. M., Majid, R. M., & Gurning, F. P. (2024). Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota. *Jurnal Inovasi Kesehatan Terkini*, 6(2).
- Rahayu, U. S. (2020). Persepsi Pelaku UMKM terhadap Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan di Kota Bogor (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan).
- Rahma, D. (2021). Analisis Sistem dan Prosedur Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi Kasus di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar). *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 8(2).
- Rahmadani, L., & Yusuf, B. (2021). Strategi Perlindungan Sosial Berbasis Tiga Pilar: Teoritis dan Implementatif. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi*, 7(1), 45–60.
- Sembiring, P. Y. S. B., Sari, R. L., & Ruslan, D. (2023). Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 6698–6710.
- Sunaryo, D., Dadang, D., & Erdawati, L. (2021). Pengaruh Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang Akuntansi, Pengetahuan Akuntansi, dan Skala Usaha terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi. *Competitive: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Zein, A. W., & Gusvi, S. N. (2025). Ekonomi Publik pada Analisis Dampak Program Perlindungan Sosial terhadap Penurunan Angka Kemiskinan di Perkotaan. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 2(2), 100–106.